

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KAPAR KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN

Muhammad Helmi Rahman^{1)*}, Abdul Haliq²⁾, Normajatun³⁾

^{1)*, 2), 3)}

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Kalimantan MAB Indonesia

Email: muhelmi37@gmail.com

Corresponding Author*

DOI : 10.31602/as.v11i1.20022

Riwayat Artikel :

Diterima : 14 – Juli 2025

Disetujui : 20 – Mei 2026

Diterbitkan : 30 – Mei – 2026

Hal : 1 – 9

Abstract

The objectives of this study are: (1) to examine the implementation of the Direct Cash Assistance (BLT) policy in Kapar Village, South Batang Alai District; and (2) to identify the factors that hinder the effectiveness of the BLT program in the village. This research employs a phenomenological method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews with eight informants, and documentation. The data analysis technique used is Miles and Huberman's interactive model, applying George C. Edwards III's implementation theory which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the BLT program in Kapar Village has generally proceeded well, supported by the village apparatus and aligned with established procedures. However, communication challenges persist, leading to misunderstandings among residents. Additionally, issues such as social jealousy and potential dependency on the aid pose further challenges for the village government in fostering community self-reliance.

Keywords: Implementation, Direct Cash Assistance (BLT), Communication



This is an open-access article under the CC-BY 4.0 License. Copyright © 2026 by Journal As Siyasa

PENDAHULUAN

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai respons terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak luas pada kondisi perekonomian masyarakat (Amran, 2022). BLT menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu dengan memberikan bantuan uang tunai secara langsung. Program ini dianggap efektif dalam menjangkau masyarakat lapisan bawah yang terdampak krisis ekonomi, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Seiring berjalannya waktu, BLT tidak hanya menjadi respons terhadap krisis ekonomi, tetapi juga

alat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Suharto Edi dalam (Rahmah & Riski, 2024), Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program kompensasi jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan utama membantu masyarakat miskin, khususnya rumah tangga yang berada dalam kategori tersebut. Program ini diluncurkan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap krisis ekonomi. Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, BLT juga diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan ekonomi tertentu, seperti kenaikan harga bahan bakar atau dampak pandemi. Kebijakan ini memiliki dasar pemikiran

bahwa bantuan langsung dapat memberikan manfaat nyata dan cepat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Desa Kapar yang terletak di Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu desa yang menerima program BLT dari pemerintah pusat. Desa ini memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang khas, di mana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh harian. Adanya program BLT diharapkan dapat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, terutama mereka yang berada dalam kategori rentan seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat kurang mampu.

Pelaksanaan program BLT di Desa Kapar tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, yang dalam praktiknya, kriteria penerima manfaat di Desa Kapar disederhanakan dengan tiga kategori utama, yaitu: masyarakat disabilitas atau penderita sakit kronis, lansia berusia 60 tahun ke atas, dan masyarakat kurang mampu yang mana dari ketiga kriteria tadi juga harus memenuhi syarat, yakni tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Proses penyederhanaan ini dilakukan melalui musyawarah desa guna menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Jumlah penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kapar berjumlah 24 orang, yaitu: masyarakat disabilitas sebanyak 1 orang, lansia berusia 60 tahun ke atas sebanyak 9 orang, serta penderita sakit kronis sebanyak 14 orang. Setiap penerima mendapatkan dana sebesar Rp300.000 per bulan, yang dicairkan secara berkala setiap dua hingga tiga bulan sekali. Sistem pencairan berkala ini dimaksudkan agar dana yang diterima dapat memberikan

manfaat yang lebih signifikan dan membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hasil observasi yang peneliti lakukan pada Senin, 17 Maret 2025 di lapangan menunjukkan bahwa program BLT di Desa Kapar telah memberikan dampak positif, terutama bagi lansia dan masyarakat disabilitas yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap. Bantuan ini dianggap dapat meringankan beban ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai alur administrasi yang harus ditempuh.

Penelitian sebelumnya oleh (Sulistyorini et al., 2022) mengenai implementasi BLT dana desa di Desa Pilangkenceng menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Pengelolaan BLT dilakukan secara mandiri oleh pihak desa melalui musyawarah untuk menetapkan penerima manfaat sesuai kriteria yang telah ditentukan. Penyaluran bantuan dilakukan secara transparan melalui Bank Jatim, dan penerima manfaat dinilai tepat sasaran karena penentuan calon penerima dilakukan secara partisipatif. Hal ini sejalan dengan kondisi di Desa Kapar, di mana penentuan penerima manfaat BLT dilakukan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan kriteria masyarakat disabilitas, lansia berusia 60 tahun ke atas, dan masyarakat kurang mampu yang bukan penerima PKH.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmah & Riski, 2024) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, dengan tujuan untuk mengetahui distribusi dan kendala dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi mengungkapkan bahwa kepala desa memulai proses distribusi dengan mengadakan musyawarah desa untuk

menentukan nama-nama Kepala Keluarga yang akan menerima bantuan. Namun, proses ini kemudian menuai keluhan dari masyarakat terkait keakuratan daftar penerima bantuan, karena beberapa nama yang terdaftar bukan merupakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pendistribusian BLT dilakukan sesuai dengan tahap pendataan yang telah disepakati, namun kendala yang muncul adalah adanya ketidaktepatan sasaran dalam pendataan penerima bantuan. Hal ini disebabkan oleh nama-nama yang diusulkan berdasarkan kedekatan dengan perangkat desa, sehingga masyarakat yang kurang mampu, namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan lain seperti PKH, Raskin, dan bansos lainnya, tidak mendapatkan bantuan. Kendala ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam sistem pendataan dan pengelolaan program agar bantuan tepat sasaran dan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi kebijakan BLT di Desa Kapar dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Secara sederhana, kebijakan publik dapat dipahami sebagai rencana atau strategi yang dirancang oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan publik mencakup segala aturan dan regulasi yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, baik itu hubungan antarwarga maupun hubungan antara warga dengan pemerintah. Kebijakan ini biasanya dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang (UU), peraturan presiden, atau peraturan daerah (perda). Bentuk-bentuk

kebijakan ini menjadi landasan hukum yang mengikat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pemerintah. (Herniwati, 2015)

Kebijakan publik menurut Winarmo dalam (Nafilla Muhara Sadna, 2022), dapat dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Kebijakan publik tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga dapat bersifat fasilitatif, yaitu memfasilitasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai pihak yang mengarahkan dan memastikan bahwa kepentingan umum terpenuhi. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan publik harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pertimbangan yang matang agar kebijakan yang dihasilkan dapat efektif dan diterima oleh semua pihak. (Herniwati, 2015; Nafilla Muhara Sadna, 2022)

Konsep Implementasi

Implementasi dapat dipahami sebagai tahap eksekusi dari suatu perencanaan yang telah dirancang secara matang (Nurdin dalam (Ainiyah et al., 2022)). Implementasi bertujuan untuk menerapkan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam praktik nyata sehingga dapat memberikan dampak bagi individu maupun masyarakat secara luas (Mulyasa dalam (Ainiyah et al., 2022)). Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Anjani et al., 2024), implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan karakteristik masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, serta kemampuan lembaga pelaksana dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut.

Terdapat beberapa model dalam implementasi kebijakan, antara lain:

1. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn:
 - 1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan
 - 2) Sumber kebijakan

- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan
- 4) Karakteristik badan pelaksana
- 5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- 6) Kecenderungan pelaksana
2. Model implementasi kebijakan George C. Edwards III
- 1) Komunikasi
- 2) Sumber daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur birokrasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Grindle dalam (Agustina & Hendra, 2021) menyebutkan bahwa terdapat dua faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu faktor substansi kebijakan (*content of policy*) dan faktor lingkungan kebijakan (*context of policy*), dapat dijelaskan berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan dan sumber jurnal yang ada di internet.

Konsep Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu kebijakan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk merespon persoalan kemiskinan, khususnya dalam situasi krisis seperti pandemi. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu Rumah Tangga Sasaran (RTS), guna membantu mempertahankan daya beli dan konsumsi mereka. Ketika terjadi pandemi, BLT berperan sebagai salah satu upaya mitigasi dampak ekonomi yang ditimbulkan, terutama bagi mereka yang terjebak dalam kemiskinan atau rentan terhadap penurunan kondisi ekonomi akibat pembatasan sosial dan gangguan pada sektor pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di

Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemudian, jika masih tidak terdapat keluarga miskin, desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Kehilangan mata pencaharian
2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel
3. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
5. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi agregat yang mencerminkan tingkat kepuasan individu secara keseluruhan. Teori kesejahteraan (*welfare theory*) pada umumnya diadopsi dari teori Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation*, bahwa individu memiliki hasrat untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhannya. Menurut (Rosni, 2017), kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan manusia dalam upaya mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan konsep yang kompleks dan melibatkan berbagai indikator yang saling terkait. Menurut (Syam et al., 2020), kesejahteraan masyarakat suatu negara dapat dilihat dari perspektif ekonomi melalui instrumen pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut (Sukmasari, 2020)

kesejahteraan masyarakat tercermin melalui pemenuhan tempat tinggal yang layak, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, serta kemampuan individu dalam memaksimalkan utilitas pada batas anggaran tertentu.

Menurut Bintarto dalam (Oktriawan et al., 2022) kesejahteraan bisa diukur dengan beberapa hal dalam kehidupan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dari aspek materi misalnya kualitas bahan pangan, kualitas rumah, dan sebagainya.
2. Kualitas hidup dari segi fisik misalnya lingkungan alam, kesehatan tubuh dan sebagainya.
3. Kualitas hidup dari segi mental misalnya lingkungan budaya, fasilitas pendidikan dan sebagainya.
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti etika, moral, keserasian penyesuaian, dan sebagainya

Sedangkan menurut penelitian oleh (Purwanto, 2020), kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Perumahan; 4) Pendapatan; dan 5) Pengeluaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan tradisi dalam ilmu sosial yang sangat bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam konteksnya masing-masing (Kirk dan Miller dalam (Anggito & Setiawan, 2018)). Jenis penelitian ini adalah fenomenologi dengan penyajian deskriptif. Menurut (Fitriana, 2018), penelitian fenomenologi dilakukan dengan cara menggali pengalaman manusia berdasarkan perspektif mereka sendiri, bukan berdasarkan asumsi eksternal.

Penelitian ini menghimpun dua jenis data yakni data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui metode observasi dan wawancara kepada Kepala Desa Kapar,

Sekretaris Desa Kapar, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa Kapar, dan 5 (lima) orang Masyarakat yang berstatus sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Kapar, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kegiatan dokumentasi terkait dengan data-data penerima bantuan, visi dan misi, struktur organisasi, dan dokumen penunjang penelitian lainnya. Kemudian, data dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019) melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kapar

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kapar merupakan salah satu bentuk dari implementasi kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak secara ekonomi, terutama sejak masa pandemi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan BLT. Teori oleh George C. Edwards III memiliki empat indikator utama yang dijadikan acuan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pada aspek komunikasi, pelaksanaan program BLT di Desa Kapar menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalin komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Informasi mengenai program disosialisasikan melalui musyawarah desa, selebaran, serta penyampaian langsung oleh RT dan BPD. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara formal dalam rapat, tetapi juga secara informal yang disampaikan dari mulut ke mulut.

Meski dengan upaya berbagai cara komunikasi tersebut, Kepala Desa Kapar

menjelaskan bahwa masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami prosedur teknis pencairan BLT, baik mekanisme hingga persyaratan. Beberapa warga penerima manfaat BLT masih perlu didampingi oleh anggota keluarga dalam proses administrasi.

Dari aspek sumber daya, pelaksanaan BLT di Desa Kapar didukung oleh perangkat desa, RT, RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana program. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa para pelaksana program BLT baik dari pihak perangkat desa ataupun lembaga desa lainnya seperti BPD tidak mendapat pelatihan khusus. Pendapat dari para pelaksana juga menyatakan bahwa mereka telah memahami prosedur standar dari pemerintah pusat. Sarana dan prasarana di desa pun memadai, seperti ruangan kantor, sistem administrasi, dan perangkat dokumentasi lain seperti tanda terima, dan lain sebagainya.

Selain para pelaksana, peneliti juga menilai sumber daya lainnya yakni aspek pendanaan dari program BLT. Sesuai dengan hasil penelitian, program BLT di Desa Kapar berasal dari 12% Dana Desa yang penyalurannya dilakukan setiap tiga bulan sekali (triwulan). Akan tetapi, periode penyaluran ini bisa disesuaikan kembali menurut kondisi yang ada di Desa. Seperti di awal tahun, anggaran dana desa terlebih dahulu digunakan untuk kesejahteraan perangkat desa, sehingga penyaluran dana BLT umumnya dilakukan di bulan Maret. Selebihnya, penyaluran dana BLT dapat dilakukan menyesuaikan dengan kondisi sehingga tidak menutup kemungkinan penyaluran dana dilakukan setiap bulan.

Indikator implementasi selanjutnya adalah disposisi atau sikap pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksana program BLT di Desa Kapar memiliki komitmen yang tinggi untuk keberhasilan program, terutama dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Salah satu caranya adalah dengan menghindari

terjadinya tumpang tindih antara penerima BLT dengan program bantuan lainnya seperti PKH ataupun bantuan pemerintah lainnya.

Komitmen dari para pelaksana program BLT di Desa Kapar ini juga terlihat melalui solusi yang mereka kembangkan untuk ketepatan sasaran program, dimana mereka tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga menerapkan sistem perangkungan yang lebih lanjut mempertimbangkan kondisi ekonomi, usia lanjut, disabilitas, dan jumlah tanggungan keluarga. Sehingga, implementasi kebijakan tidak dilakukan secara kaku dengan terpaku pada ketentuan pusat, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih yang disisi lain juga tidak mengabaikan SOP dari pemerintah pusat.

Indikator implementasi terakhir adalah struktur birokrasi. Sesuai dengan hasil penelitian diketahui bahwa struktur birokrasi yang diterapkan dalam pelaksanaan BLT di Desa Kapar berjalan cukup baik dan tertata. Program dilaksanakan dengan melibatkan banyak unsur seperti perangkat desa, RT, RW, BPD, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas serta pihak kecamatan dan pendamping desa. Adanya SOP dari pemerintah pusat dan kabupaten menjadi pedoman dalam pelaksanaan, sementara mekanisme internal yang dibuat oleh pemerintah desa seperti sistem perangkungan menjadi pelengkap yang merupakan sebuah terobosan guna memastikan ketepatan sasaran bantuan yang diberikan.

Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kapar

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kapar tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan. Dalam menganalisis faktor-faktor penghambat ini, peneliti kembali menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, dimana hambatan dalam implementasi kebijakan

dapat terjadi pada empat aspek utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang menjadi kendala pada implementasi program BLT di Desa Kapar adalah dari aspek komunikasi. Walaupun sosialisasi telah dilakukan secara rutin melalui selebaran, musyawarah desa, serta penyampaian informasi oleh RT dan BPD, namun hasil wawancara diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pencairan BLT belum sepenuhnya sama. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya penerima bantuan yang tidak membawa dokumen penting seperti KTP dan Kartu Keluarga saat penyaluran bantuan. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang tidak memahami larangan menerima bantuan ganda, seperti BLT dan PKH secara bersamaan. Hal ini tentu akan menyebabkan miskomunikasi antara pihak pelaksana dan masyarakat.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat George C. Edwards III, yang menyatakan bahwa kegagalan komunikasi akan menyebabkan pesan kebijakan tidak tersampaikan secara utuh, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.

Kendala lainnya adalah adanya kecemburuan dari pihak masyarakat yang tidak menerima bantuan. Sebagian masyarakat merasa dirinya layak untuk menerima BLT namun tidak terdaftar sebagai penerima, yang menimbulkan rasa iri dari pihak masyarakat, terutama dengan adanya pergantian daftar penerima di setiap periode. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Desa Kapar karena harus menjelaskan secara terus-menerus mekanisme dan proses seleksi penerima kepada masyarakat.

Selain itu, salah satu kekhawatiran dari pihak pemerintah desa adalah sikap ketergantungan dari masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bantuan sebagai sumber tetap penghidupan, bukan sebagai bentuk bantuan darurat atau sementara.

Sehingga dari pihak pemerintah desa sendiri memerlukan kebijakan lebih lanjut untuk dapat kembali ‘memandirikan’ masyarakatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan, sebagai berikut: 1) Implementasi Program BLT di Desa Kapar secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan empat prinsip tersebut, implementasi program BLT sudah sesuai dengan pelayanan yang diharapkan, proses komunikasi dan ketersediaan informasi sudah sangat memadai, dukungan dari perangkat desa dan lembaga terkait serta sikap dari pelaksana juga sudah sesuai berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan; 2) Kendala utama yang dihadapi dari program ini adalah dari segi komunikasi. Meski melalui berbagai upaya komunikasi, beberapa warga belum memahami prosedur teknis pencairan serta larangan bantuan ganda, sehingga menimbulkan miskomunikasi. Selain itu, faktor kendala lainnya adalah munculnya kecemburuan sosial serta potensi ketergantungan terhadap bantuan yang menjadi kendala pemerintah desa dalam membangun masyarakat yang mandiri.

Terkait dengan potensi adanya ketergantungan masyarakat terhadap program BLT ini, peneliti menyarankan kepada pihak pemerintah, khususnya pemerintah Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan untuk mulai mengadakan pelatihan keterampilan, pembinaan UMKM atau program padat karya yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi warga penerima BLT, sehingga mereka dapat menyadari bahwa bantuan yang mereka dapatkan bersifat sementara dan masyarakat

lebih termotivasi untuk mandiri secara finansial.

REFERENSI

- Agustina, I., & Hendra, A. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 8(2), 132–144. <https://doi.org/10.33701/jekp.v8i2.2792>
- Ainiyah, Q., Fatikah, N., & Yuyun Faris Daniati, E. (2022). Konsep Implementasi Pembelajaran Tafsir Amaly Dan Kaitannya Dengan Pemahaman Ayat Tentang Fikih. *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 71–87. <https://doi.org/10.54437/ilmuna.v4i1.407>
- Amran. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Secara Merata Kepada Masyarakat. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.29103/jtp.v2i1.7715>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Fitriana, N. (2018). Komunikasi Ritual Seniman Dalam Memproduksi Karya Seninya (Studi Fenomenologi mengenai Komunikasi Ritual Seniman Rizki Luthfi Wiguna dalam memproduksi Karya Seni Patung dan Lukisan di ISBI Bandung). *Universitas Komputer Indonesia*.
- Herniwati. (2015). Agenda Kebijakan Publik Pada Badan Perpustakaan Dan Arsip (BPA) Kota Pekanbaru. *Fakultas Ilmu Administrasi: Universitas Lancang Kuning*.
- Nafilla Muhara Sadna. (2022). Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. *Winarno*, 17–18.
- Oktriawan, W., Adriansah, A., & Alisa, S. (2022). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(1), 01–14. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.96>
- Purwanto, E. (2020). Peran Pasar Kelompok Wanita Tani Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Mojopahit Kecamatan Punggur). *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO*.
- Rahmah, S., & Riski, M. (2024). Analisis Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal EL-Riyasah*, 15(2), 77–88.
- Rosni. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*, 9(1), 53–66. <https://doi.org/10.24114/jg.v9i1.6038>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta).
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al- Qur ' an. *AT-TIBYAN: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 3(1), 1–16.
- Sulistiyorini, W., Srijani, N., & Berlianantiya, M. (2022). Peran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pilangkenceng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 11(1), 103–111. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v11i1.15031>
- Syam, R., Sukarna, & Nurmah. (2020). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat Menggunakan Model Regresi Multivariat. *Journal of Mathematics Computations and Statistics*, 3(2), 97–108. <https://doi.org/10.35580/jmathcos.v3i2.19189>
- Agustina, I., & Hendra, A. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 8(2), 132–144. <https://doi.org/10.33701/jekp.v8i2.2792>
- Ainiyah, Q., Fatikah, N., & Yuyun Faris Daniati,

- E. (2022). Konsep Implementasi Pembelajaran Tafsir Amaly Dan Kaitannya Dengan Pemahaman Ayat Tentang Fikih. *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 71–87. <https://doi.org/10.54437/ilmuna.v4i1.407>
- Amran. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Secara Merata Kepada Masyarakat. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.29103/jtp.v2i1.7715>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Fitriana, N. (2018). Komunikasi Ritual Seniman Dalam Memproduksi Karya Seninya (Studi Fenomenologi mengenai Komunikasi Ritual Seniman Rizki Luthfi Wiguna dalam memproduksi Karya Seni Patung dan Lukisan di ISBI Bandung). *Universitas Komputer Indonesia*.
- Herniwati. (2015). Agenda Kebijakan Publik Pada Badan Perpustakaan Dan Arsip (BPA) Kota Pekan Baru. *Fakultas Ilmu Administrasi: Universitas Lancang Kuning*.
- Nafilla Muhara Sadna. (2022). Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. *Winarno*, 17–18.
- Oktriawan, W., Adriansah, A., & Alisa, S. (2022). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(1), 01–14. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.96>
- Purwanto, E. (2020). Peran Pasar Kelompok Wanita Tani Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Mojopahit Kecamatan Punggur). *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO*.
- Rahmah, S., & Riski, M. (2024). Analisis Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal EL-Riyasah*, 15(2), 77–88.
- Rosni. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*, 9(1), 53–66. <https://doi.org/10.24114/jg.v9i1.6038>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta).
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al- Qur ' an. *AT-TIBYAN: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 3(1), 1–16.
- Sulistyorini, W., Srijani, N., & Berlianantiya, M. (2022). Peran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pilangkenceng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 11(1), 103–111. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v11i1.15031>
- Syam, R., Sukarna, & Nurmah. (2020). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat Menggunakan Model Regresi Multivariat. *Journal of Mathematics Computations and Statistics*, 3(2), 97–108. <https://doi.org/10.35580/jmathcos.v3i2.19189>